

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang

Vidya Vitta Adhivinna¹, Niken Damayanti²

Universitas PGRI Yogyakarta

adhivinna@upy.ac.id

Abstract

The reason for this study is to see whether there is an impact from the government's internal control system, the use of information technology, the society participation on the village fund management accountability. This study involves essential information as an overview with disconnected surveys disseminated to 8 villages that got village fund in Ngluwar District, Magelang Regency, with 88 respondents. Information test utilizing SPSS rendition 25, theory testing utilized in this review, to be specific, different direct examination. The outcomes showed that the government's internal control system positively affected the village fund management accountability. Nonetheless, the use of information technology doesn't influence the village fund management accountability. In the mean time, the society participation positively affects the village fund management accountability.

Keywords: *the government's internal control system, the use of information technology, the society participation, the village fund management accountability.*

Abstrak

Alasan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada dampak dari sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kajian ini melibatkan informasi penting sebagai gambaran umum dengan disebarluaskan survei terputus ke 8 desa yang mendapat dana desa di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dengan 88 responden. Pengujian informasi menggunakan SPSS rendition 25, pengujian teori yang digunakan dalam tinjauan ini, lebih spesifiknya, pemeriksaan langsung yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

Tanggal Submit : 15 Agustus 2022

Tanggal Revisi : 27 September 2022

Tanggal Publish : 30 September 2022

A. PENDAHULUAN

Pada pemerintah desa hal yang selalu menjadi permasalahan yaitu ketertiban administrasi desa yang masih sangat kurang dan pertanggungjawaban yang dilaporkan tidak sesuai kenyataan dimana hal ini permasalahan nya yaitu pengelola dana desa, dengan ini keuangan pada desa yang dimiliki harus bisa dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa misalnya seperti akuntabilitas (Febrian & Alamasyah, 2020). Akuntabilitas bisa ditujukan dalam pertanggungjawaban sebuah kegagalan atau keberhasilan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dari tahun lalu yang mana hal ini biasa dilakukan secara periodik (Martini et al., 2019). Mengerjakan bantuan pemerintah dan nilai peningkatan kota melalui menggarap administrasi terbuka di desa, mendorong ekonomi desa, mengalahkan lubang kemajuan antar desa dan memperkuat jaringan desa sebagai subjek kemajuan adalah salah satu tujuan dari keberadaan cagar desa (Hanafie et al., 2019).

Sistem pengendalian internal dapat digunakan sebagai interaksi yang diperlukan dalam kegiatan dan latihan yang diselesaikan oleh inisiatif dan semua pekerja untuk memberikan kepercayaan yang memuaskan dalam pembuatan tujuan hierarkis melalui latihan yang kuat dan produktif, kualitas laporan moneter yang tak tergoyahkan, melindungi sumber daya dan konsistensi negara. dengan peraturan dan pedoman (Kalumata et al., 2016). Tugas kerangka pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam melaksanakan administrasi moneter yang bertanggung jawab sangatlah besar, untuk itu pelaksanaan SPIP pada organisasi pemerintahan tampil sebagai suatu pelaksanaan yang terarah, efektif dan terkendali yang mengatur interaksi, pengelolaan dan tanggung jawab (Hasanah et al., 2020). Pelaksanaan inside control framework otoritas publik berarti membuat administrasi moneter bertanggung jawab dan lugas baik kepada legislatif pusat maupun di sekitarnya, dengan cara ini administrasi moneter dapat direpresentasikan ke wilayah lokal yang lebih luas (Puspa dan Prasetyo, 2020).

Pada pengelolaan dana desa, aparatur desa sangat membutuhkan teknologi informasi yang baik untuk melancarkan dan mempermudah pekerjaan aparatur desa (Sugiarti & Yudianto, 2017). Teknologi akan membantu meningkatkan kinerja pemerintah desa di berbagai kegiatan dengan tepat dan akurat sehingga hal ini dapat meningkatkan produktivitas desa itu sendiri (Pahlawan et al., 2020).

Aparatur desa setiap tahun selalu membuat program kerja yang pasti akan melibatkan Partisipasi masyarakat desa untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan program – program kerja (Pahlawan et al., 2020). Masyarakat dapat memberikan usulan atau saran atas perealisasi dana desa dan pemerintah desa wajib memberikan informasi mengenai alokasi dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Zulfa Wafirotin & Septiviastuti, 2019).

Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa penemuan yang saling bertentangan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Purnamawati dan Adnyani, 2019); (Puspasari dan Purnama, 2018); (Kalumata et al., 2016). Tinjauan lain mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020). Menurut Hidayah dan Wijayanti (2017), lingkungan pengendalian tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi ini menambahkan dua faktor, khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat yang dianggap memiliki dampak langsung dan timbal balik pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengungkapkan apakah dana desa yang telah memenuhi peran nya sebagai insentif serta apakah setiap desa, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Telaah Literatur

a. *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, serta pekerjaan tersebut dilakukan pemerintah atas dasar kepentingan organisasi dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Teori ini ada karena terdapat filosofi yang berkaitan dengan sifat yang dimiliki manusia, pada prinsipnya manusia memiliki tanggungjawab, integritas yang baik dan dapat dipercaya sehingga hal ini berkaitan dengan seseorang yang sedang menjalankan pemerintahan maka diamanatkan untuk dapat melakukan tindakan baik dan demi kepentingan seluruh masyarakat (Donaldson, 1991). Kaitan antara hipotesis ini merupakan penggambaran keberadaan pemerintah desa sebagai asosiasi wilayah publik yang dapat diandalkan dan dipercaya dalam melayani wilayah setempat sehingga nantinya tujuan hierarkis dapat tercapai dengan tepat (Budiana et al., 2019).

b. Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban untuk menjelaskan kinerja dan tindakan orang/badan pimpinan/hukum kolektif pada organisasi terhadap pihak yang berwenang dan berhak atas keterangan atau pertanggungjawaban, dalam hal keuangan akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas integritas keuangan, ketaatan dan pengungkapan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini nantinya akan berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan serta peraturan undang-undang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, yang dilakukan oleh instansi pemerintah setempat (LAN & BPKP, 2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rekening Desa menyatakan bahwa dana desa adalah kebebasan dan obligasi daerah yang dapat dibalas dengan uang tunai dan segala sesuatunya sebagai uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hal ini dapat dimaknai dengan adanya cadangan kota yang didapat dari pemerintah pusat untuk melayani perbaikan kota, dengan ini pemerintah kota memiliki komitmen untuk menangani rekening-rekening tersebut secara tepat dan hati-hati. Bagian 2 menyatakan bahwa ada hak istimewa dan komitmen yang akan menghasilkan pembayaran, penggunaan, pembiayaan, dan kota eksekutif. Pasal 93 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan dana desa dipisahkan atas: penataan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumuman, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari pemberian informasi yang handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu yang disajikan oleh sistem akuntansi (Budiadnyani, 2020).

2. Pengembangan Hipotesis

a. Sistem pengendalian internal pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah diakui melalui otorisasi kejujuran, kualitas moral, kewajiban kemampuan, administrasi yang menguntungkan, pengaturan konstruksi hierarkis yang sesuai dengan kebutuhan dan asosiasi kerja yang besar dengan organisasi penting pemerintah (Puspa & Prasetyo, 2020). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ada dampak antara kerangka kontrol interior otoritas publik pada tanggung jawab administrasi moneter dana desa (Martini et al., 2019). Berdasarkan ekspektasi yang tertera diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel yang signifikan bagi setiap orang dalam bekerja dengan pekerjaannya sehingga tidak adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Kalumata et al., 2016). Penatausahaan laporan keuangan dana desa akan memiliki waktu yang cukup, lebih tepat dan

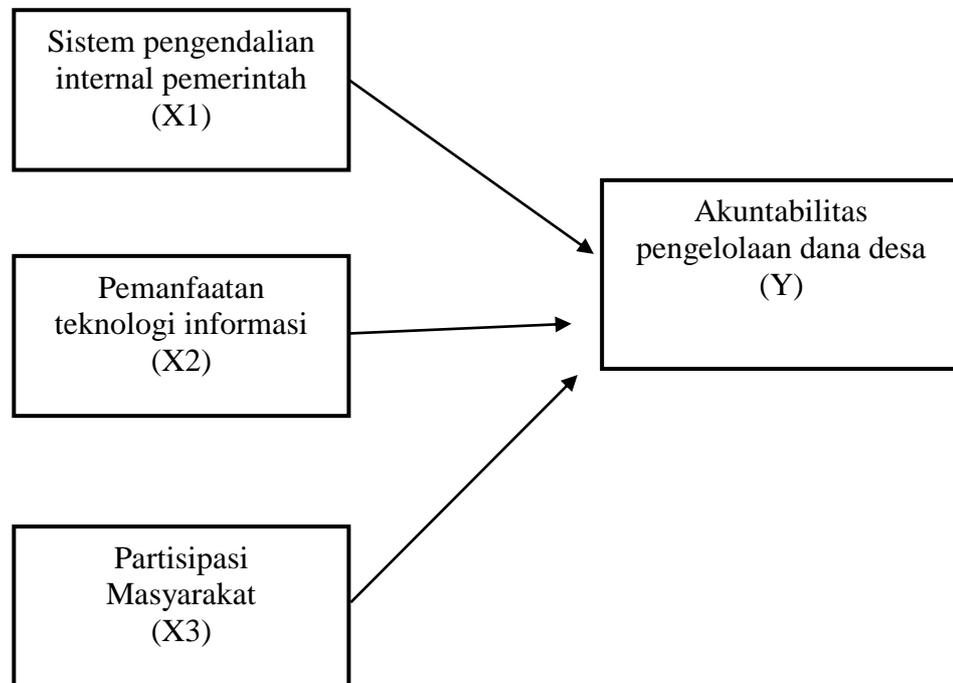
lebih lugas dengan asumsi pemanfaatan teknologi informasi yang ada digunakan secara tepat (Sugiarti & Yudianto, 2017). Hasil pengujian sebelumnya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020). Berdasarkan ekspektasi yang tertera diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat mendorong tanggung jawab yang lebih baik untuk para eksekutif. transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas desa dalam mengawasi aset desa dapat menyebabkan daerah mendapatkan data yang tepat tentang pemanfaatan dan penggunaan aset desa dalam kemajuan kota (Hafiez & Afrizal, 2021). Asosiasi daerah dalam penyelenggaraan subsidi kota akan lebih memudahkan pemerintah desa untuk melakukan perbaikan desa dengan cara ini penyelesaian proyek-proyek pengelola desa akan lebih baik karena mediasi dari masyarakat desa itu sendiri (Zulfa Wafirotin & Septiviasuti, 2019). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020).

H3: partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, yang mana Kecamatan Ngluwar ini memiliki 8 desa yaitu: Desa Bligo, Somokaton, Karang Talun, Pakunden, Ngluwar, Jamus Kauman, Ploso Gede, Dan Blongkeng. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 8 desa di Kecamatan Ngluwar yang mendapatkan alokasi dana desa setiap tahunnya. metode pengumpulan sampel pada penelitian menggunakan purposive sampling yaitu suatu metode yang pengambilan sampel dari populasinya dilakukan dengan cara mempertimbangkan kriteria tertentu sesuai dengan tema penelitian (Sugiono, 2008). Jadi dengan *purposive sampling* kriteria yang akan dimasukan peneliti dalam menentukan sampel yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Bagian Keuangan, Kaur Bagian Pembangunan, Kaur Bagian Umum, Dan Seluruh Duku.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian pada Kecamatan Ngluwar karena terlihat dari LKJIP tahun 2020 Kecamatan Ngluwar telah mencapai 97,67% dalam hal kinerja indikator sasaran strategi pembangunan desa yaitu dengan menyelesaikan 4 program dengan jumlah anggaran Rp.253.025.275 dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.247.136.368. Tingkat pengakuan rencana pengeluaran yang dicapai saat ini dalam kategori umumnya sangat baik. Strategi gambaran umum yang digunakan adalah dengan mengedarkan kuesioner yang ditunjukkan dengan tanggapan responden dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju (skala Likert 1 sampai 5). Survei diajukan, diselesaikan dan ditanggapi langsung oleh responden setelah dikumpulkan kembali ke peneliti. Penelitian ini menggunakan tiga macam faktor, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependen variable*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan selama bulan November dengan penyebaran kuesioner secara offline. Setelah penelitian ini selesai dan menghasilkan pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu uji kualitas data (validitas dan keandalan) dan uji hipotesis. Profil responden dalam penelitian ini disusun berdasarkan orientasi, kedewasaan, pendidikan terakhir, jabatan dan masa kerja. Karakteristik responden yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 88 responden penelitian. Setelah menganalisis karakteristik responden, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis menggunakan SPSS. Analisis data ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan analisis regresi linier berganda (Algifahri, 2015). Model pengukuran menggunakan uji statistik deskriptif (tabel 4.4), uji validitas (tabel 4.5) dan uji reliabilitas (tabel 4.6).

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden

	Data	Jumlah	Presentase
Gender	Laki – Laki	72	82%
	Perempuan	16	18%
Umur	20 – 30 Tahun	13	15%
	31 – 40 Tahun	27	31%
	41 – 50 Tahun	24	27%
	>51 Tahun	24	27%
Pendidikan Terakhir	SMP	1	1%
	SMA/SMK	70	80%
	D3	5	14%
	S1	12	6%
Jabatan	Kepala Desa	8	9%
	Sekretaris Desa	8	9%
	Kaur Bagian Keuangan	8	9%
	Kaur Bagian Pembangunan	8	9%
	Kaur Bagian Umum	8	9%
	Dukuh	48	55%
Masa Jabatan	<5 Tahun	36	41%
	5 Tahun	13	15%
	>5 Tahun	39	44%
Total Semua		88	100%

Pengukuran standar deviasi pada penelitian ini diukur menggunakan uji statistik deskriptif yang ditujukan untuk memberikan diskripsi mengenai variabel yang ada dalam penelitian serta gambaran mengenai karakter dari sampel yang digunakan (Tabel 4.4). kualitas data dalam tinjauan ini dicoba menggunakan dua teknik, yaitu uji validitas dan reliabilitas, informasi tersebut dapat dianggap valid dengan asumsi bahwa nilai signifikansinya <0,05 dan nilai Pearson *Coreliation*>0,05 dan informasi tersebut dapat diduga menjadi reliabel dan dapat diandalkan bila hasil *Cronbach alpha* >0,60.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Max	Min	Mean	Standar Deviasi
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	88	55	43	48,50	3,353
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	88	40	31	35,24	2,359
Partisipasi Masyarakat (X3)	88	40	27	34,05	2,648
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	88	85	67	74,20	4,609

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2022

Tabel 4.7 menunjukkan hasil tes uji beda lurus relaps. Uji t diharapkan dapat menguji faktor-faktor otonom pada variabel terikat. Mengingat pentingnya outcome esteem dalam SPSS, alasan arah jika bernilai sig. < 0,05 maka faktor bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, namun sejauh nilai sig. > 0,05 maka faktor bebas tidak berpengaruh besar terhadap variabel terikat (Tabel 4.8). Tabel 4.9 menunjukkan hasil dari uji F, di mana uji F seharusnya dapat dilakukan dengan melihat nilai kepentingan dalam tabel ANOVA. Dengan asumsi nilai kepentingan ANOVA dengan = 5% maka model tersebut dinyatakan dapat dicapai (Ghozali, 2016:99). Selain kedua pengujian tersebut, konsentrasi ini juga mencoba informasi dengan menggunakan koefisien assurance test yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model untuk memahami kapasitas faktor-faktor yang terkait, sedangkan sisanya dilakukan dengan cara yang berbeda (Ghozali, 2016) terdapat pada (Tabel 4.10).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T	Sig.	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,644	3,354	0,001	H1 : Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-0,334	-1,272	0,207	H2 : Ditolak
Partisipasi Masyarakat	0,800	5,292	0,000	H3 : Diterima
Konstanta		27,490		
Adjusted R ²		0,427		
F		22,583		

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2022

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Hipotesis		Kesimpulan
H1	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Terdukung
H2	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Tidak Terdukung
H3	Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Terdukung

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 4.8, tabel 4.9 dan tabel 4.10 yaitu menggunakan uji t, uji F dan uji R² dengan signifikansi 5%. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa hanya ada dua hipotesis yang diterima yaitu 1 dan 3. Mengingat pengujian spekulasi yang telah dilakukan, sangat mungkin terlihat bahwa H0 tidak didukung dan H1 didukung. Sehingga cenderung diartikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di seluruh kota di Kabupaten Ngluwar. Hasil tersebut diperoleh dari nilai uji t terukur dimana nilai kepentingan lebih rendah daripada nilai kepentingan yang digunakan, yaitu 0,001 < 0,05. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan mengukur efektifitas pada kegiatan suatu organisasi dengan lebih mempertimbangkan berbagai aspek – aspek seperti manfaat, SDM, biaya dan keefektifitasan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih terkendali (Martini et al., 2019).

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Atiningsih et al. (2019), Pahlawan et al. (2020) dan Puspa & Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Martini et al. (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4. 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	825,180	3	275,000	22,583	0,000 ^b
	Residual	1023,138	84	12,180		
	Total	1848,318	87			
a. Dependent Variabel: APDD						
Predictors: Constant SPIP, PTI, PM						

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2022

Meskipun demikian, dilihat dari pengujian teori yang telah dilakukan, sangat terlihat bahwa H0 didukung dan H2 tidak didukung. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di seluruh kota di Kabupaten Ngluwar. Hasil tersebut diperoleh dari nilai uji t faktual dimana nilai kepentingan lebih menonjol daripada nilai kritis yang digunakan, khususnya $0,207 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada desa belum berjalan dengan baik serta kurangnya kesadaran aparatur desa akan pentingnya teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mencari informasi secara cepat dan tepat. Pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan memanfaatkan teknologi secara tepat akan memudahkan pemerintah desa dalam mengirimkan dan menerima informasi kepada pihak pemerintah daerah. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi juga dapat disebabkan oleh kurang mengertinya pemerintah desa terhadap kemajuan teknologi saat ini yang mana hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari pemerintah desa dan dapat menghambat pelaporan dan kegiatan yang ada.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sapartiningsih et al. (2018), Riyadi & Kurnadi (2020), dan Karyadi (2019) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Eksplorasi ini juga sesuai dengan Pahlawan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,668 ^a	0,446	0,427	3,49002

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan pengujian spekulasi yang telah dilakukan, sangat mungkin terlihat bahwa H0 tidak didukung dan H3 didukung. Sehingga dapat dimaknai bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di seluruh kota di Kabupaten Ngluwar. Hasil ini diperoleh dari nilai uji t terukur dimana nilai kepentingan lebih kecil dari nilai besar yang digunakan, khususnya $0,000 < 0,05$. Program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan dapat berhasil jika masyarakat selalu dilibatkan pada pengambilan keputusan dan pengidentifikasian suatu potensi atau masalah yang ada, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Atiningsih et al., 2019).

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Julianto & Dewi (2019), Atiningsih et al. (2019) dan Pahlawan et al. (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafaruddin et al. (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari peninjauan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa. Selanjutnya variabel Partisipasi Masyarakat menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah desa, agar lebih update lagi dalam menggali informasi serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang ada, agar pengelolaan dana desa dapat terkendali dan berjalan dengan lebih baik.

2. KETERBATASAN DAN SARAN

Seperti penelitian lainnya penelitian ini memiliki dua keterbatasan, pertama masih ada beberapa aparatur desa yang enggan untuk mengisi kuesioner, karena tema kuesioner yang berhubungan dengan dana desa, hal ini membuat proses pelaksanaan pengisian kuesioner sedikit terhambat. Selain itu Dikarenakan masih dalam masa pandemi dimana dalam kantor balai desa tidak boleh lebih dari 50% aparatur desa yang datang setiap hari nya, hal ini membuat peneliti tidak bisa menjelaskan isi dari kuesioner kepada aparatur desa secara bersamaan, yang membuat proses pengisian kuesioner tidak dapat di dampingi peneliti secara keseluruhan dan membuat penelitian menjadi terhambat. Dengan keterbatasan yang ada peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, agar Peneliti selanjutnya bisa lebih baik dalam menjelaskan tema penelitian. Hal ini dilakukan supaya aparatur desa tidak ragu dalam mengisi kuesioner yang diberikan. Selain itu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendampingi pengisian secara langsung kepada seluruh responden, agar hasil yang didapatkan lebih baik.

REFERENCE

- Atiningsih, S., Aulia,), Ningtyas, C., Bank, S., & Jateng, B. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparatur pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 12–25.
- Budiadnyani, N.P. (2020). Kepemilikan administratif sebagai arbiter dari dampak kekuatan modal pada kekuatan muatan. *Pembukuan E-Jurnal*, 30(9), 2244.
- Budiana, D. A., Said, D., dan - , N. (2019). Dampak dari kemampuan gadget kota dan sistem kontrol internal pada tanggung jawab dewan kota. *Buku Harian Eksplorasi Logis*, VII(I), 10-20.
- Budiarto, D.S. (2019). *Panduan Eksplorasi Kuantitatif: Mendistribusikan Stunts Untuk Amatir* (edisi pertama).
- Donaldson. (1991). *Hipotesis penatalayanan atau hipotesis organisasi: Kepala administrasi dan mitra kembali*.
- Febrian, D., dan Alamsyah, S. (2020). Dampak keterampilan kepala toko kota pada tanggung jawab cadangan kota (Studi kasus di kota-kota di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi). *Buku Harian Akuntansi dan Ekonomi*, 10(2), 206-213.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Hanafie, H., Nugraha, A., dan Huda, M. (2019). Tanggung jawab cadangan kota (studi tentang tanggung jawab aset kota di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *Buku Harian Ilmu Pemerintahan: Studi Ilmu Pemerintahan Daerah dan Ilmu Politik*, 4(1), 39.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., dan Purnama, D. (2020). Kewajiban organisasi moneter kota: garis besar pemerintahan sipil di Wilayah Cibeureum, Rezim Kuningan. *Audit Pembukuan dan Bisnis Indonesia*, 4(1).
- Harry. (2014). *Pembukuan Penting*.

- Hidayah, N., dan Wijayanti, I. (2017). Aset Kota Penyelidikan kontekstual Board Responsibility (DD) di Kota Wonodadi, Kelurahan Ngrayun, Aturan Ponorogo. Dalam *Kerangka Data* (Vol. 2).
- Julianto, I.P., dan Dewi, G.A.K.R.S. (2019). Dampak Kepentingan Daerah, Pemanfaatan Kerangka Moneter Kota, Keterampilan Fasilitator Kota dan Kewajiban Pemerintah Lingkungan terhadap Penatausahaan Aset Kota yang Efektif. *Buku Harian Logis Pembukuan*, 4(1), 24-42.
- Kalumata, M. C. T., Ilat, V., dan Warongan, J. D. L. (2016). Dampak dari keterampilan aset manusia, inovasi data, survei laporan moneter dan kerangka pengendalian ke dalam pada sifat laporan moneter di pemerintahan Sulawesi Utara adalah hal yang biasa. *Tanggung jawab*, 5(2), 152-167.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh kerangka pengendalian internal, pemanfaatan inovasi data dan kemampuan aset manusia pada tanggung jawab keuangan kota (berkonsentrasi di Wilayah Aikmel dan Wilayah Lenek pada tahun 2018). *Buku Harian Logis Rinjani*, 7(2), 33-46.
- LKjIP Kecamatan Ngluwar 2020 2. (2020).
- Lochhead, R.Y. (1989). Penyesuaian elektrosterik emulsi air dalam minyak dengan pengental poli (korosif akrilik) yang diubah secara hidrofobik. *Ilmu dan Teknik Material Polimer, Prosiding Divisi ACS Ilmu dan Teknik Material Polimer*, 61(1), 407.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E., Akuntansi, J., Negeri, P., Jalan, S., dan Negara, S. (2019). Kerangka kontrol internal otoritas publik untuk tanggung jawab administrasi keuangan toko kota di Kabupaten Sembawa. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>
- Martini, R., Rachma Sari, K., Vera Riama Pangaribuan, L., dan Sari, H. (2018). Keuntungan dari bunga dalam organisasi pertambangan: perspektif modal ilmiah. *Buku Harian Administrasi dan Bisnis Terapan*, 4, 87-92.
- Pada, S., Usaha, S., Luas, P., Rokan, K., dan Hulu. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian tanggung jawab kantor pemerintahan. Dalam *Buku Harian Pekbis* (Vol. 3, Edisi 3).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Priyatno. (2014). *SPSS 22 Informasi Down to earth* Papan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Purnamawati, I.G.A., dan Adnyani, N.K.K.S. (2019). Pekerjaan tanggung jawab, kemampuan, dan keduniawian lain dalam administrasi cadangan kota. *Buku Harian Pembukuan Multiparadigma*, 10(2).
- Puspa, D.F., dan Prasetyo, R.A. (2020). Dampak dari kemampuan pemerintah kota, kerangka kontrol internal, dan keterbukaan laporan keuangan terhadap kota menjadi tanggung jawab eksekutif. *Media Penelitian Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 20(2), 281.
- Puspasari, O. R., dan Purnama, D. (2018). Pelaksanaan kerangka moneter kota dan sifat laporan keuangan pemerintah kota dalam Perda Kuningan. *Buku Harian Studi Pembukuan*, 2(2), 145-159.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.

Sugiarti, E., dan Yudianto, I. (2017). Penyelidikan faktor kemampuan aset manusia, pemanfaatan inovasi data, dan kepentingan moneter pada cadangan kota menjadi tanggung jawab eksekutif (tinjauan kota-kota di Kelurahan Klari, Kawasan Karawang Timur, Kawasan Majalaya). *Personalia Aspek Keuangan dan Bisnis*. Perguruan Tinggi Padjajaran. Sumedang, 580-590.

Sugiyono. (2008). *Teknik Eksplorasi Bisnis Bandung* : CV Alfabetta.

Syafaruddin, A. R. A., Kamase, J., & Mursalim. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur , Sistem Pengendalian Internal ,. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 9–16.

Warsita. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan Dan Aplikasinya*. Jakarta:Rineka.

Yusri. (2016). *Analisis Linear Berganda*.

Zulfa Wafirotin, K., dan Septivastuti, U. (2019). Dampak keterusterangan, kepentingan daerah, dan tanggung jawab terhadap penatausahaan aset kota di pemerintahan Ponorogo. *Logical Diary aspek Keuangan*, 14, 31-44.